

**Eksploitasi *Concubinage* dan Subjek *Subaltern*: Hegemoni atas Perempuan Indonesia dalam Tinjauan Kritis Pascakolonial dan Feminisme Novel *De Winst* Karya Afifah Afra**  
**Exploitation of Concubinage and Subaltern Subjects: Hegemony toward Indonesian Women in Critical Review of Postcolonial and Feminist in Afifah Afra's Novel *De Winst***

**Bambang Aris Kartika**

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Jember  
68121, HP. 081578981991, Pos-el: bambang\_kartiko@yahoo.co.id

(Makalah diterima tanggal 25 Februari 2011—Disetujui tanggal 13 April 2011)

**Abstrak:** Tulisan ini membahas praktik kolonisasi Belanda yang mengakibatkan terjadinya bias ketidakadilan gender terhadap posisi perempuan Indonesia dalam novel *De Winst* karya Afifah Afra. Bias ketidakadilan gender ini tercermin dari adanya eksploitasi secara seksual terhadap kaum perempuan dengan menjadikan mereka sebagai *concubinage* atau gundik dan menjadi subjek *subaltern* akibat praktikal hegemoni kekuasaan kaum laki-laki kulit putih kolonial Belanda. Melalui pendekatan teori pascakolonial dan ragam kritik sastra feminisme pascakolonial diperoleh suatu pemahaman bahwa kaum perempuan pada masa kolonial menjadi subjek yang termarginalkan, baik secara seksual maupun sosial. Kaum perempuan tidak memiliki *bargaining power* dalam ranah hukum untuk menuntut adanya pengakuan sebagai istri yang sah dan memiliki kedudukan yang terhormat, bukan menjadi korban dominasi kekuasaan laki-laki atas tubuh, baik secara seksual maupun tenaga untuk urusan domestik rumah tangga (*double burden*), termasuk juga stereotipe negatif yang cenderung merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan.

**Kata-Kata Kunci:** konkubin, subaltern, kolonialisme, teori pascakolonialisme, kritik sastra pascakolonial

**Abstract :** This paper discusses the practice of Dutch colonization which resulted in a gender injustice bias toward the position of Indonesian women in the novel *De Winst* author by Afifah Afra. This is reflected from the practical sexual exploitation against women by making them as concubines (*concubinage*) or “wives” who are actually represented as a concubine because of no formal “diperistri” by white people and become the subject of subaltern or oppressed because of the practical power of the male hegemony white man of Dutch colonial. Through a variety of postcolonial theory and postcolonial feminist literary criticism, the analysis gained an understanding that women in the colonial period became the subject of both sexually marginalized and social. These women had no bargaining power in the realm of law to demand the recognition of the legitimate as a wife and a respectable position, not a victim of male domination of power over the body, either sexual or domestic labor for their household affairs (*double burden*), including negative stereotypes that tend to lower their dignity as women.

**Key Words:** concubinage, subaltern, colonialism, theory of postcolonialism, postcolonial feminist literary of critics

**PENGANTAR**

Secara historis, kolonialisme di Indonesia sekaligus dengan hegemoni politik

dan ekonomi beserta sistem eksploitasinya telah terjadi sejak awal abad ke-17, dengan didirikannya *Verenigde Oost*

*Indische Compagnie* (VOC). Menurut Kartodirdjo (1990:5—6), pada umumnya kolonialisme dipicu oleh faktor penguasaan ekonomi dengan tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain, seperti politik, agama, dan petualangan.

Hubungan Belanda-Indonesia kurang lebih selama tiga setengah abad, telah berlangsung eksploitasi, diskriminasi, dan hegemoni kekuasaan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sejarah, praktik kolonialisme atau imperialisme tidak hanya dilakukan oleh Belanda, tetapi juga oleh Portugis, Spanyol, dan Jepang. Perempuan pribumilah sebagai lapis bawah yang merasakan ketertindasan tersebut. Posisi perempuan pada masa kolonial lebih diposisikan sebagai subjek *subaltern*. *Subaltern* adalah mereka yang berada pada posisi nondominan dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari kelompok-kelompok *mainstream* yang memiliki kekuasaan (Guha, 2000:7). Terma *Subaltern* digunakan dalam teori poskolonial untuk merujuk sekelompok orang marjinal dan kelas rendah. Kata ini dirumuskan oleh Antonio Gramsci. Gramsci menegaskan bahwa kelompok ini memang ada karena adanya hegemoni. Secara sederhana definisi hegemoni adalah dominasi sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa paksaan. Dalam semangat lebih dalam, kata *Subaltern* menjadi sering digunakan setelah seorang *third-world-India-postcolonial-feminist* yang menjadi Profesor Avalon di Columbia University Amerika Serikat, Gayatri Chakravorty Spivak, menulis esai “*Can the Subaltern Speak?*” (Soekirno, 2006). Posisi perempuan Indonesia sebagai *subaltern*, baik sebagai objek historiografi kolonialis maupun sebagai subjek pemberontakan, konstruksi ideologi gender tetap mempertahankan laki-laki sebagai pihak yang dominan (Spivak, 1993:83). Sementara Bhabha (dalam Turner, 2006:24) menyebutkan munculnya studi-studi *subaltern* di negara-negara

berkembang sebagai studi wacana kebudayaan (*cultural discourse studies*).

Selain itu juga, perempuan Indonesia mengalami eksploitasi dan diskriminasi serta hegemoni kekuasaan dari laki-laki bangsa Eropa, terutama Belanda, yang patriarkhal dan dominan dengan menempatkan perempuan sebagai konkubin (*concubinage*), yaitu seorang perempuan yang berfungsi sebagai “istri” tetapi tanpa ikatan hukum terhadap laki-laki yang sudah beristri. Konkubin berawal pada sejarah perbudakan, ketika hubungan antara pemilik budak dan budak perempuan hanya dijadikan konkubin (perbudakan seksual). Ann Stoler (1995) secara rinci membahas bagaimana pria-pria (baca: *white-male*) Perancis di Cina dan Belanda di Indonesia melakukan praktik konkubin pada perempuan-perempuan Asia.

Potret buram perempuan Indonesia sebagai objek dari praktikal konkubin dan subjek *subaltern*, masih harus menanggung beban tidak hanya dalam urusan seksual, melainkan juga urusan pekerjaan domestik rumah tangga dengan posisi sebagai pelayan (*jongos*) bukan sebagai istri. Menurut Sara Mills (dalam Jackson dan Jones, 2009:177) bidang domestik yakni wilayah pribadi yang sangat berhubungan dengan kerja perempuan dan paling sering digambarkan sebagai wilayah feminim, juga merupakan dukungan penting untuk mempertahankan dominasi kolonial. Penegasan yang sama dikemukakan juga oleh McClintock (1995:35) yang mengatakan bahwa ciri utama kekuasaan kolonial terhadap negara lain atau subjek pribumi adalah mengubah kedomestikan yang mengakar dalam kelas dan peran gender Eropa menjadi kedomestikan sebagai pengontrol atas bangsa jajahan. Artinya, bagaimana hak-hak perempuan Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, yang diperistri oleh pria Belanda kulit putih, tidak memiliki hak layaknya hak seorang istri kepada suaminya yang sah secara

hukum. Praktik ini menunjukkan upaya mempertahankan dan mengontrol dominasi kolonial terhadap perempuan pribumi sebagai subjek yang dijajah.

Membicarakan diskursus perempuan Indonesia masa kolonial tidak dapat dilepaskan dari perspektif feminisme dan pendekatan teori pascakolonial. Konteks perspektif feminisme ini menekankan pada upaya-upaya gerakan perempuan dalam melawan ketidakadilan dan dominasi patriarki yang pada masa kolonial sangat melekat dengan posisi dan peran perempuan, khususnya perempuan pribumi. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua alasan penting terkait hubungan antara feminisme dengan teori pascakolonial, seperti dikemukakan oleh Sianipar (dalam Lim Sing Meij, 2009:39) yang menyatakan bahwa:

*Pertama*, baik patriarki dan imperialisme merupakan analogi dominasi terhadap pihak yang disubordinasikan. Berbagai pengalaman perempuan dalam masyarakat patriarki dan subjek yang mengalami dapat disejajarkan sebagai fokus perhatian dan opsi perjuangan melawan dominasi. *Kedua*, terdapat perdebatan dalam beberapa masyarakat bekas koloni tentang apakah persoalan gender dan tekanan kolonial merupakan faktor politik yang sungguh penting dalam kehidupan perempuan.

Pada umumnya, pascakolonial didefinisikan sebagai teori yang lahir sesudah kebanyakan negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Bidang kajiannya mencakup seluruh khazanah tekstual nasional, khususnya karya sastra yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Tema-tema yang perlu dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan, di antaranya politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, ekonomi, kesenian, etnisitas, bahasa, dan sastra, sekaligus dengan praktik di lapangan, seperti perbudakan,

pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang lain. Keberagaman permasalahan tersebut dipersatukan oleh tema yang sama, yaitu kolonialisme (Ashcroft et al, 2003:xxii—xxiii).

Persoalan-persoalan yang muncul pada masa kolonialisme di Indonesia, terungkap juga dalam karya sastra Indonesia. Salah satu karya sastra yang mengungkapkan praktik kolonialisasi terhadap kaum pribumi adalah novel *De Winst* karya Afifah Afra, terutama aspek kolonialisasi pada diri kaum perempuan, seperti praktik perbudakan dan pendudukan, pergundikan atau konkubin, pelarangan dan pembatasan akses terhadap keberlangsungan pendidikan bagi kaum pribumi, dan pembatasan hak atas pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat terjajah. Praktik perbudakan dan pendudukan sangat menonjol pada kaum perempuan pribumi yang seakan-akan dijadikan istri simpanan namun sebenarnya mereka dijadikan sebagai buruh kontrak seksual oleh laki-laki kulit putih Eropa, seperti apa yang dilakukan Jan Thijsee kepada Partini. Sebenarnya Jan Thijsee sudah memiliki istri orang Belanda yaitu Everdine Kareen Spinoza, namun karena tidak memperoleh pelayanan atas kebutuhan biologisnya, dia pun kemudian memposisikan Partini sebagai gundik atau *nyainya*. Jan Thijsee tidak memperlakukan hubungan dengan Partini sebagai istri, melainkan hubungan bisnis terkait dengan urusan seksual.

Para perempuan pribumi yang menjadi istri simpanan itu ternyata tidak saja harus memenuhi kebutuhan seksual, melainkan juga harus mengurus dan melayani keperluan tuan-tuan mereka terkait dengan urusan domestik rumah tangga. Kaum pribumi juga tidak diperbolehkan memperoleh akses pendidikan yang tinggi oleh kolonialis Belanda sehingga dengan sembunyi-sembunyi kaum terpelajar pribumi mengajar mereka agar tidak tertangkap oleh pemerintahan

penjajah. Terkait dengan pembatasan atas hak ekonomi masyarakat, ditegaskan dalam novel ini bagaimana para pengusaha Belanda atau kaum pemilik modal pada pabrik yang mereka miliki berlaku sewenang-wenang, yaitu dengan memberlakukan upah yang kecil termasuk untuk sewa atas tanah mereka bahkan apabila perlu dipergunakan cara-cara kekerasan terhadap kaum pribumi yang melawan, termasuk kejadian pelecehan dan kekerasan seksual yang menimpa diri Pratiwi. Perempuan pribumi terdidik yang berani melawan kesewenang-wenangan Jan Thijsee selaku pemilik pabrik gula De Winst dalam menerapkan upah dan biaya sewa yang kecil kepada masyarakat Colomadu sebagai pemilik tanah dan buruh pabrik.

Novel *De Winst* karya Afifah Afra tersebut merupakan karya sastra yang lahir pada masa sekarang. Namun, ceritanya merepresentasikan kenyataan masyarakat, khususnya perempuan Indonesia, masa kolonialisme Belanda dengan *setting* kehidupan masyarakat Jawa di pabrik gula *De Winst* Surakarta milik seorang pengusaha Belanda. Dalam karya sastra tersebut, tokoh-tokoh perempuan sangat merasakan perilaku kolonialis yang patriarkhal dan cenderung eksploitatif, hegemonik, dan diskriminatif serta dominatif, khususnya dalam konteks seksual. Perempuan pribumi berposisi sebagai konkubin, pekerja domestik, menjadi subjek *subaltern*, dan sebagai pihak terjajah yang tertindas oleh kekuasaan laki-laki kulit putih Belanda. Dengan demikian, pendekatan feminisme dan pascakolonial dalam makalah ini menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman tentang realitas kaum perempuan Indonesia pada masa kolonialisasi Belanda melalui analisis pada karya sastra.

## TEORI

Teori pascakolonial menawarkan cara pemahaman baru sebab permasalahan-

permasalahan dalam teori ini sangat luas dan menantang, berkaitan dengan ras, agama, hegemoni, dan politik (Ratna, 2008:133). Persoalan-persoalan ras, agama, hegemoni dan politik merupakan persoalan krusial yang dialami oleh masyarakat pribumi dari para kolonialis yang cenderung bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat di tanah jajahan sebagai sebuah kondisi yang harus diterima, seperti pembentukan perspektif sebagai perempuan “Dunia Ketiga” yang mengarah kepada peran sebagai seseorang yang menjalani kehidupan yang tercabik-cabik berdasarkan gender feminimnya, dalam arti dibatasi secara seksual. Kemudian juga menjadi perempuan yang bercirikan bodoh, miskin, tidak berpendidikan, terikat dengan tradisi domestik, berorientasi pada keluarga, dan menjadi korban (Mohanty, 1984:337). Selain itu juga, menerima perlakuan pelecehan secara ras dengan memberikan stereotype *inlander*, pergundikan melalui praktik konkubin bagi perempuan pribumi, posisi sebagai *subaltern* (kaum tertindas), pembatasan terhadap hak-hak politik dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat pribumi maupun yang berasal dari kalangan priyayi ningrat.

Stephen Slemon (2001:102) menyatakan bahwa teori pascakolonial tidak merujuk pada suatu negara, melainkan kondisi-kondisi yang ditinggalkannya (*postcolonial conditions*). Teori pascakolonialis adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern (Ratna, 2008:90). Objek penelitian pascakolonialisme menurut Ashcroft et al (2003:xxii) mencakup aspek-aspek kebudayaan yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal terjadinya kolonialisme hingga sekarang, termasuk berbagai aspek yang ditimbulkannya.

Ciri khas studi pascakolonialisme adalah berobjek teks-teks yang berkaitan dengan wilayah bekas jajahan imperium Eropa, seperti Indonesia (Ratna, 2008:115). Lebih lanjut, Ratna (2008:95—96) mengemukakan keterkaitan antara pascakolonial dengan teks sebagai objek penelitian bahwa teori pascakolonial adalah segala tulisan yang ada kaitannya dengan paradigma superioritas Barat terhadap inferioritas Timur, baik sebagai orientalisme maupun imperialisme dan kolonialisme. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Walia (2003:83) yang menyatakan bahwa objek kolonialisme sebagai segala tulisan (teks) yang berkaitan dengan pengalaman kolonial. Teks atau wacana semata-mata merupakan ruang metodologis, dipegang oleh bahasa, dan dialami dalam proses produksi (Barthes, 1987:39—40). Dalam perspektif ini, teks bukan semata-mata teks, tetapi teks memiliki konteks, bahkan keseluruhan hidup ini adalah teks, maka apa pun yang dibicarakan dalam sebuah karya memiliki relevansi dengan isi kehidupan ini (Ratna, 2008:133).

Merujuk pada ciri-ciri postkolonialisme di Indonesia ini dapat ditemukan pada karya sastra Indonesia, salah satunya adalah dalam *genre* sastra prosa fiksi atau novel yang bercerita dengan latar sejarah masa kolonialis. Sebab dari teks-teks yang terdapat dalam novel dapat dijadikan sebagai dasar menganalisis gejala-gejala kultural pada masa imperium kolonialisasi oleh imperium Eropa melalui tinjauan teori pascakolonial. Novel jelas merupakan objek karya sastra terpenting. *Pertama*, pertimbangan dari segi medium yang cukup luas dan kaya, apabila dibandingkan dengan *genre* lain. *Kedua*, dalam novel terkandung isi, pesan, dan amanat, bahkan juga konsep-konsep yang beraneka ragam (Ratna, 2008:136).

Sebagaimana dijelaskan oleh Fanon (1963) dan Bhabha (1994), karya sastra

pascakolonial sarat dengan masalah dan ciri-ciri ambivalensi psikologis. Artinya, masyarakat terjajah memiliki kecenderungan mengalami depresi psikologis sebagai akibat hegemoni kekuasaan yang dilakukan selama masa pendudukan. Karya sastralah yang dianggap sebagai media paling tepat untuk melukiskannya, melalui penceritaan kembali, baik sebagai citra nostalgia maupun arketipe. *Pertama*, karya sastra adalah bahasa, sistem tanda, sehingga sangat tepat untuk melukiskan perasaan. *Kedua*, karya sastra bukan objektivitas itu sendiri. Masalah-masalah yang dikemukakan dalam karya sastra bukan kolonialisme sebagaimana dipahami dalam sejarah umum, melainkan apa yang dibuat oleh kolonialisme. *Ketiga*, sastra adalah refleksi sekaligus refraksi, inovasi sekaligus negasi dan afirmasi. Melalui kemampuan kreativitas imajinatif karya sastra pada gilirannya melukiskan masalah yang ada sekaligus mungkin ada, bahkan yang mungkin sama sekali tidak ada dalam kenyataan (Ratna, 2008:134—135).

Dengan demikian, penggunaan teori pascakolonial dalam menganalisis fenomena kolonialisme yang dialami oleh perempuan pribumi yang terdapat dalam karya sastra sangat relevan, terutama karya sastra yang substansi ceritanya mengemukakan teks-teks tentang praktik-praktik kolonisasi oleh kaum penjajah Eropa seperti eksploitasi seksual perempuan pribumi dengan menjadikan mereka sebagai konkubin dan subjek subaltern atau subjek tertindas baik sebagai objek kekerasan seksual, hegemoni atas sektor domestik, dan pemberian stereotipe negatif yang cenderung melecehkan dan mensubordinasi.

Oleh karena itu, rumusan teori terhadap analisis karya sastra novel *De Winst* karya Afifah Afra sangat mungkin untuk dilakukan melalui pengkajian-pengkajian secara feminisme dan dari perspektif pascakolonial, khususnya untuk memotret praktik-praktik

peninggalan penjajahan Belanda terhadap perempuan Indonesia, praktik-praktik kolonialisasi yang berbasis pada ketidakadilan gender dan semangat patriarki, konstruksi sosial budaya yang ingin diruntuhkan kaum feminis. Hal ini didasarkan pada perspektif teori pascakolonial yang memandang pentingnya teks yang terdapat dalam karya sastra sebagai ciri khas objek penelitian teori pascakolonialisme yang mencerminkan kondisi inferioritas bangsa pribumi oleh praktik superioritas bangsa kolonialis Eropa, terlebih lagi pada diri perempuan pribumi.

## **METODE**

Sastra mengacu pada dunia karya imajinatif atau fiksi. Namun sastra mentransformasikan kenyataan ke dalam teks. Walaupun pengacuannya dunia fiksi, namun kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yaitu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan (Max Eastman dalam Welck & Warren, 1990:30—31). Sementara itu, secara definitif teori pascakolonial dimanfaatkan untuk menganalisis khazanah kultural yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Indonesia jelas menyediakan berbagai naskah yang dapat dianalisis melalui teori pascakolonial, salah satunya adalah naskah dalam bentuk karya sastra (Ratna, 2008:106).

Dengan demikian, metode pembahasan dalam tulisan ini menitikberatkan pada pendekatan analisis pascakolonial dan sastra feminis. Hal ini dikarenakan objek dan data kajiannya adalah teks karya sastra yang memfokuskan pada persoalan-persoalan ketidakadilan gender pada perempuan Indonesia yang berlangsung semasa kolonialisme Belanda.

Analisis berdasarkan teori sastra feminis dipergunakan karena pembahasan dalam tulisan ini membicarakan tentang diskursus yang berhubungan dengan gerakan perempuan yang berakar dari

pemahaman mengenai inferioritas perempuan. Konsep kunci feminis adalah kesetaraan antara martabat perempuan dan laki-laki. Mill dan Taylor yakin bahwa jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberi perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama dengan yang dinikmati oleh laki-laki (Tong, 1998:23)

Pembahasan dalam tulisan ini juga menggunakan analisis pascakolonialisme karena *setting* dan *plot* cerita novel *De Winst* adalah historikal dari realitas kehidupan kolonialisme Belanda yang terungkap dalam teks sastra. Menurut Ratna (2008:108) terdapat paling sedikit lima alasan mengapa karya sastra dianggap tepat dianalisis melalui teori-teori pascakolonial, yaitu (1) Sebagai gejala kultural sastra menampilkan sistem komunikasi yang sangat kompleks, yang secara garis besar terjadi melalui triadik pengarang, karya sastra, dan pembaca. Komunikasi ini sekaligus merupakan mediator antara masa lampau dengan masa sekarang; (2) Karya sastra menampilkan berbagai problematika kehidupan, emosionalitas dan intelektualitas, fiksi dan fakta, karya sastra adalah masyarakat itu sendiri; (3) Karya sastra tidak terikat oleh ruang dan waktu, kontemporalitas adalah manifestasinya yang paling signifikan; (4) Karya sastra adalah bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri adalah satu-satunya cara mentransmisikan ideologi, yaitu ideologi kolonial; dan (5) Berbagai masalah yang dimaksudkan dilukiskan secara simbolis, terselubung, sehingga tujuan-tujuan yang sesungguhnya tidak tampak. Di sinilah ideologi oriental ditanamkan, di sini pulalah analisis pascakolonial memegang peranan.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan makalah ini bersifat deskriptif kualitatif dalam bentuk kajian tekstual yang didukung dengan studi pustaka. Pemaknaan akan teks dilakukan dengan menggunakan pendekatan

pascakolonial dan feminisme. Teks yang berfungsi sebagai data lebih bersifat kualitatif, misalnya data-data yang mendeskripsikan posisi dan peran perempuan pribumi dalam masa kolonisasi Belanda. Analisis yang digunakan yaitu meneliti dengan cara menandai dan mengklasifikasikan data yang ada pada novel yang berkaitan dengan praktik konkubin, subjek *subaltern* atas urusan domestik rumah tangga dan kedudukan perempuan dalam relasi seksual, dan kekerasan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Eksplorasi Perempuan Indonesia sebagai *Concubinage***

Sejak abad ke-18-an, saat para pedagang, para utusan yang umumnya adalah bujangan, dan serdadu Belanda melakukan penjajahan di tanah Indonesia dengan tidak membawa istri atau tidak adanya perempuan Eropa untuk memuaskan seksualitas mereka, karena terbatasnya jumlah perempuan Eropa seperti yang diinginkan oleh laki-laki Eropa tersebut, maka para laki-laki itu memilih jalan untuk menikahi atau hidup bersama dengan perempuan-perempuan pribumi dalam suatu hubungan pergundikan (Sugihastuti dan Septiawan, 2007:107). Hubungan pergundikan ini dalam terminologi kolonial Indonesia biasa disebut dengan *pernyiaan*, sedangkan dalam feminisme pascakolonial lebih dikenal dengan praktik konkubin (*concubinage*) atau kontrak seksual.

Untuk menggambarkan konsep *nyai* atau gundik pada masa kolonial, Wahyudi (2003) mengatakan sebagai berikut.

Di masa kolonial, *pernyiaan* adalah suatu praktik hidup bersama antara seorang Eropa atau seorang Cina dengan seorang atau lebih perempuan pribumi tanpa dilandasi dengan suatu legalitas perkawinan. Pola hubungan semacam ini diterima apa adanya pada masa itu, karena institusi itu muncul sebagai

suatu kefaktualan atau semacam kenyataan sosial yang tidak mungkin dielakkan dan berlangsung sebagai sesuatu yang dapat dikatakan alami. Dengan pengertian lain, "*pernyiaan*" tidak lain adalah produk sosial yang muncul akibat suatu kondisi penjajahan atau kolonialisme yang menempatkan sang penjajah sebagai pihak superior dan yang dijajah sebagai inferior.

Perempuan yang hidup pada masa kolonial dan menjadi *nyai* pun tidak terlepas dari jeratan sistem patriarki sehingga ia masih diposisikan sebagai objek. Para perempuan dipandang masih dibelenggu oleh kultur patriarki dan bukan sebagai subjek yang memandang dan menyiasati kekuatan-kekuatan dominan dan hegemonik (Baso, 2005:23). Oleh sebab itu, alasan laki-laki Eropa untuk menjadikan perempuan pribumi sebagai *nyai* merupakan bentuk penjajahan sosial dan kultural perempuan tersebut. Laki-laki Eropa memiliki kekuasaan dalam perekonomian sehingga dapat memiliki apa yang dikehendakinya. Kaum penjajah menempatkan diri sebagai kelompok sosial yang berposisi sebagai subjek, arogan, dan superior di hadapan masyarakat pribumi (Saputra, 2009). Hal itu tercermin dari perilaku Jan Thijsee yang mengeksploitasi Partini secara seksual dengan menjadikannya sebagai gundik atau buruh seksual kontraknya. Partini dieksploitasi kualitas feminitas unsur seksualitasnya untuk menjadi budak nafsu kebutuhan biologis Jan Thijsee yang orang Eropa.

Akan tetapi, Jan adalah manusia dewasa yang normal akan seksual. Untuk melampiaskan kebutuhannya, ia pun memilih cara seperti yang dilakukan oleh sebagian besar lelaki sebangsanya. Ia memiliki seorang wanita pribumi sebagai gundik. Partini, nama perempuan itu. Seorang wanita jelita yang begitu pintar memikat hati lelaki. Kemiskinan yang menghimpit, telah membuat ia memilih jalan pintas, yakni

menjual satu-satunya yang ia miliki, rupa elok sekaligus tubuh yang semok (Afra, 2010:173)

... Jan pun menjadikan sang wanita sebagai buruh seksual kontraknya dengan syarat selama dalam kontrak, Partini dilarang melayani lelaki lain, berapa pun besar bayarannya serta harus selalu siap jika Jan mendatangnya sewaktu-waktu. (Afra, 2010:173—174)

Maka, perasaan bungah di wajah cantik yang Njawani milik Partini pun, tak mampu menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Bagi Jan, Partini tak lebih sebagai budak nafsu belaka, yang ia beli dengan sejumlah uang. Hubungan mereka hanya sebatas bisnis kenikmatan. Ia membeli tubuh Partini untuk dinikmati. (Afra, 2010:176)

Data tersebut menunjukkan bagaimana posisi perempuan pribumi menjadi objek perilaku patriarki laki-laki Eropa yang secara ekonomi memang memiliki kelebihan selain merupakan bentuk arogansi dan superioritas identitas Jan Thijsee terhadap perempuan pribumi. Partini tidak memiliki status yang jelas dihadapan hukum sebagai istri sah dari Jan Thisee yang *notabene* adalah orang kulit putih Belanda. Oleh karena relasi kekuasaan yang dibangun antara keduanya hanya sebatas hubungan bisnis kenikmatan atau dilatarbelakangi oleh persoalan kebutuhan ekonomi dan seksualitas, bukan berdasarkan perasaan mencintai dan menghargai posisi perempuan sebagai mitra laki-laki dalam konteks rumah tangga. Terlebih lagi secara ekonomi, Partini terlilit dengan kemiskinan, dan di satu sisi memiliki kelebihan daya tarik seksual, seperti tubuh yang semok atau seksi dan rupa yang elok sehingga dalam konstruksi sosial dan hukum, Partini tidak memiliki *bargaining power* untuk diperlakukan sebagai istri, sebagaimana perlakuan kepada perempuan Eropa, dalam lingkup rumah tangga dihadapan laki-laki kulit putih (bangsa

Eropa). Hubungan kekuasaan dalam rumah tangga mereka ibarat majikan dan pekerja, bukan hubungan yang *equal* sebagai mitra dalam urusan rumah tangga. Partini tidak memperoleh hak-hak yang sama dengan perempuan kulit putih Eropa yang dijadikan istri oleh para laki-laki Eropa.

Perbudakan seksual dalam terminologi feminisme merupakan praktikal hegemoni dan diskriminatif yang menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan. Sebab, bagaimanapun yang dirugikan dari praktik ini adalah tetap perempuan, karena perempuan pada akhirnya menjadi objek dari kontrol seksual laki-laki atas diri mereka. Kontrol secara seksual yang dilakukan oleh Jan Thijsee kepada Partini dengan melakukan kontrak seksual merupakan bentuk penindasan pada tubuh perempuan, terlebih lagi dalam substansi kontrak tersebut Partini tidak boleh melayani laki-laki lain dan harus siap melayani kebutuhan biologis Jan Thijsee apabila sewaktu-waktu dia datang. Hal tersebut menutup kesempatan bagi Partini untuk menikah secara sah dengan laki-laki lain yang akan memperistrinya, termasuk dengan Jan Thijsee.

Bentuk penindasan terhadap tubuh perempuan pribumi tidak saja pada urusan seksual, melainkan juga relasi kuasa perempuan dan laki-laki disektor domestik. Praktik konkubin oleh laki-laki kulit putih Belanda tidak saja pada urusan kebutuhan seksual, melainkan juga untuk urusan-urusan melayaninya kebutuhan non-seksual, seperti memasak, mencuci, menyiapkan pakaian, maupun mengurus rumah (*double burden*).

“Darimana kau tahu, bahwa saya suka makan kentang goreng dan ayam bakar?” tanya Jan, heran.

“Dari Mbakyu Riyani. Dia adalah Nyai-nya *Meneer* De Haas.”

...

Keprofesionalan Partini, membuat Jan merasa terhibur. Ia pun membiarkan perempuan itu membukakan jas, dasi



serta sepatunya. Ketika Partini menyodorkan sebuah piama sutera – yakni piyama yang sengaja ia tinggal di rumah Partini, dengan senang hati ia menyambutnya.

“Jika *Meneer* ingin mandi air hangat, saya sudah siapkan!”

...

“Saat *Meneer* mandi, makanan akan saya siapkan. Jadi, *Meneer* bisa bersantap segera usai besalin.”

Jan tersenyum tipis... (Afra, 2010:176—177)

Partini ternyata oleh Jan Thijsee tidak saja dikontrak untuk urusan seksual, melainkan juga untuk urusan domestik rumah tangga, seperti memasak dan menyiapkan makan, termasuk juga menyiapkan air hangat untuk mandi sekaligus pakaiannya. Pekerjaan-pekerjaan domestik tersebut identik dengan peran dan posisi perempuan sebagai istri di negara-negara dunia ketiga. Namun karena Partini adalah perempuan pribumi yang secara struktur sosial masyarakat masa kolonial merupakan perempuan dengan kelas rendah hanya diposisikan sebagai buruh kontrak atau gundik saja, tidak dinikahi secara sah dari segi konstitusi negara penjajah, yaitu Belanda. Sebab ada aturan hukum yang sangat diskriminatif terhadap posisi perempuan Indonesia yang “diperistri” oleh laki-laki kulit putih Belanda.

Perilaku Jan Thijsee terhadap posisi dan peran Partini sebagai konkubine merupakan permasalahan yang ditentang oleh para feminis yang beraliran feminisme radikal. Menurut aliran ini, kekuasaan laki-laki atas kaum perempuan, yang didasarkan pada pemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas reproduktif perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan (Bashin, 1996:36). Feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki.

Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

### **Perempuan Indonesia sebagai Subjek *Subaltern***

Perempuan seringkali digambarkan sebagai seorang yang merepresentasikan perempuan tertindas, objek kekerasan seksual, *powerless* sekaligus dianggap sebagai sosok yang dipinggirkan, dimarginalisasikan, dilecehkan, bahkan dengan atribut-atribut lain yang terkesan mengesankan. Sebuah konstruk identitas monolitik tunggal dalam produksi “perempuan dunia ketiga”, sebagai korban budaya patriarki, tidak berpendidikan, terikat tradisi, domestik, dan selalu menjadi korban (Mohanty, 1984; Anoe-grajekti, 2009)

Perempuan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda diposisikan sebagai subjek *subaltern* (tertindas). Mereka berada pada posisi non-dominan dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari kelompok-kelompok *mainstream* yang memiliki kekuasaan. Dalam teori pasca-kolonial, perempuan Indonesia merupakan sekelompok orang-orang marjinal dan kelas rendah akibat praktik hegemoni kaum laki-laki kulit putih Eropa, khususnya Belanda. Praktik *subaltern* pada perempuan Indonesia tidak saja pada urusan menjadi objek kekerasan seksual, melainkan juga menyentuh dimensi domestik maupun stereotipe yang melecehkan.

Perlakuan yang memosisikan perempuan sebagai *subaltern* terlihat dari sikap Jan Thijsee terhadap Pratiwi yang merupakan perempuan pribumi. Praktik *subaltern* terlihat dari perlakuan Jan Thijsee yang memosisikan Pratiwi sebagai objek kekerasan seksual dan stereotipe yang melecehkan, bahkan bisa diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan nonseksual. Tindakan kekerasan yang

terkait dengan perbedaan jenis kelamin dikenal dengan istilah *gender based violence* (La Pona et al, 2002:9). Menurut La Pona et al (2002:7) kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, dan atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di masyarakat domestik dan publik.

Pratiwi datang lagi!

...  
“Jadi Anda merasa begitu besar, karena bisa memaksa kami membayar 10 kali lipat dari harga sebelumnya?” cecar Jan dengan kata-kata tajam. “Apakah Anda tidak tahu, bahwa kami adalah bangsa Eropa yang terhormat? Bahwa kami bisa membalik memaksa Anda untuk menyerahkan tanah Anda, bahkan tanpa uang sewa sepeser pun?!”

...  
“Bagaimana Nona Pratiwi?” desak Jan. “Anda setuju menyerahkan tanah itu dengan harga lama, atau kami terpaksa melaporkan Anda kepada polisi dengan tuduhan hendak merongrong kekuasaan Ratu Belanda di negeri ini? Anda tahu, para pemberontak itu, hukumannya adalah *internering*. Sudah ada beberapa perempuan semacam Anda yang diinternir Yang Mulia Gubernur Jenderal di Buitenzorg ke Boven Digul. Anda ingin menyusul?!” (Afra, 2010:165—166)

... “Saya yakin Anda adalah pembohong besar yang tengah mencoba menakut-nakuti saya. Tak perlu lagi ada perundingan! Semua telah jelas. Hanya ada 2 pilihan, pabrik menyewa tanah dengan harga 10 kali lipat lebih besar dari harga semula, atau kami akan garap sendiri tanah kami.”

“Dan polisi akan menangkap kalian?” cecar Jan dengan suara meninggi.

...  
Lantas jemarinya tertuding kepada Pratiwi. “Perempuan *idiot!*” Saat ini juga, saya akan panggil polisi untuk menangkap Anda. Centeng, ringkus perempuan tak tahu diuntung ini!” (Afra, 2010:167—168)

Berdasarkan data tersebut terlihat tindakan sewenang-wenang ditunjukkan oleh Jan Thijsee sebagai orang yang memiliki kekuasaan sebagai pemilik pabrik gula yang sedang melakukan negosiasi dengan Pratiwi, sebagai perwakilan masyarakat pribumi di kawasan Colomadu, tentang harga sewa tanah milik mereka yang selama ini disewa oleh Pabrik Gula De Winst. Jan Thijsee tidak mau mengabdikan tuntutan Pratiwi untuk meningkatkan biaya sewa tanah bahkan mengancam akan menginterning dan menyuruh polisi untuk menangkap Pratiwi apabila tidak menyetujui kesepakatan yang diajukan olehnya, dengan tuduhan pemberontak yang merongrong kewibawaan Ratu Belanda.

Jelas sekali sebagai perempuan pribumi, Pratiwi menjadi subjek *subaltern* dihadapan Jan Thijsee. Pratiwi menjadi pihak yang tertindas karena tidak bisa menuntut hak sewa atas tanah yang *notabene* adalah milik mereka dari kekuasaan Jan Thijsee sebagai pemilik Pabrik Gula De Winst. Sebagai pihak terjajah, Pratiwi menjadi korban praktik kesewenang-wenangan dari pihak penjajah. Penjajah dapat senaknya mempermainkan kekuasaan yang mereka miliki untuk berlaku menindas, bersikap tidak adil, memperlakukan kaum pribumi dengan cara kekerasan, seperti mengancam dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk menekan Pratiwi agar tidak menaikkan biaya sewa tanah, bahkan mereka bisa memaksa untuk tidak membayar sepeser pun biaya sewa tanah milik kaum pribumi. Jelas sekali praktik-praktik hegemoni,

diskriminasi, superior, dan sangat patriarki kepada perempuan pribumi.

Perilaku stereotype yang mengandung unsur melecehkan harga diri dan martabat sebagai perempuan terlihat dari makian Jan Thijsee yang ditujukan kepada Pratiwi. Jan Thijsee mengumpat Pratiwi dengan mengatakan sebagai perempuan idiot. Artinya, Jan Thijsee telah merendahkan martabat dan harga diri Pratiwi sebagai perempuan pribumi yang cerdas dan pintar serta memiliki keberanian untuk menentang praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi dari perilaku kolonial laki-laki kulit putih Eropa. Bahkan perilaku yang ditunjukkan oleh Pratiwi merupakan stereotype yang selama ini melekat pada diri perempuan Eropa. Hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran atas kemampuan perempuan pribumi yang dipandanginya memiliki peradaban yang rendah, bodoh, dan tidak berpendidikan.

Kekerasan yang dialami oleh Pratiwi sebagai perempuan pribumi dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan nonseksual karena sikap yang ditunjukkan oleh Jan Thijsee tidak terdapat unsur seksual. Kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni kekerasan seksual dan nonseksual (Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002:6). Yang membedakan antara kedua jenis kekerasan tersebut adalah ada atau tidaknya unsur kehendak seksual. Apabila terdapat unsur kehendak seksual, kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sebaliknya, apabila unsur tersebut tidak dominan, kekerasan tersebut dimasukkan dalam kategori nonseksual.

Kekerasan secara seksual juga dilakukan Jan Thijsee atas diri Pratiwi dengan melakukan pemerkosaan yang disertai pula dengan kekerasan fisik. Perilaku Jan Thijsee ini didasari oleh rasa amarah karena sikap dan perilaku Pratiwi yang berani menentangnya terkait dengan usahanya menuntut kenaikan

biaya sewa atas tanah warga yang disewa oleh Pabrik Gula De Winst pimpinannya. Untuk membalaskan rasa amarahnya, Jan Thijsee tidak saja mengancam Pratiwi untuk memenjarakannya, melainkan juga melakukan pemerkosaan dan penyerangan fisik pada tubuhnya.

“Kubunuh kau, brengsek!”

Tangan berkulit lembut itu pun terayun. Namun Jan yang masih terlena dalam syair kenikmatan yang purna ternyata cukup waspada. Ia tangkap ayunan tangan itu, lalu ia hempaskan tubuh yang telah menjadi semacam sosok Hawa sesaat setelah memakan buah quldi dan diusir dari surga ‘And, yakni polos tanpa busana, keras-keras kearah depan, tanpa menyadari bahwa segunduk bebatuan ternyata menjadi latar geografis bagian itu.

Maka, Jan pun hanya mendesis sinis, ketika menyaksikan tubuh yang tak perawan lagi itu terkulai dengan beberapa luka lebam serta darah mengalir dari kulit yang terkoyak.

“Kau benar-benar telah mati, bukan?!”

...

“Rasakan pembalasan saya,wanita busuk!” (Afra, 2010:203)

Perempuan pribumi merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki Eropa, apalagi yang memiliki kekuasaan. Pelecehan seksual yang seringkali dialami oleh perempuan pribumi adalah pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan fisik. Oleh karena itu, perempuan pribumi pada masa kolonial merupakan kelompok *sub-altern* yang secara seksual tidak memiliki *bargaining power* untuk melawan berlangsungnya kekerasan seksual pada diri mereka, seperti yang dialami oleh Pratiwi.

Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki sebagai orang Eropa, Jan Thijsee pun dengan sadar melakukan pemerkosaan dan penyerangan fisik yang mengakibatkan luka-luka pada sekujur

tubuh Pratiwi yang *notabene* adalah perempuan pribumi. Kekerasan yang dilakukannya merupakan bentuk impulsif dari egositas dirinya sebagai laki-laki kulit putih Eropa (patriarki) yang superior dengan memandang rendah, mudah diperdaya, menjadi objek seksual dan kekerasan, serta memarginalkan posisi perempuan pribumi. Dengan perspektifnya tersebut, dia memandang perempuan Indonesia mudah diperdaya sehingga dapat diperlakukan sesuai dengan keinginannya, termasuk menjadi objek seksual dan objek kekerasan.

Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda berada pada posisi nondominan dan mendapatkan perlakuan ketidakadilan berdasarkan gender yang mengarah kepada implementasi kekerasan dari kelompok-kelompok *mainstream* yang memiliki kekuasaan. Artinya, perempuan Indonesia merupakan sekelompok orang-orang marjinal dan kelas rendah akibat praktik hegemoni kaum laki-laki kulit putih Eropa, khususnya Belanda dengan memposisikan mereka sebagai pihak tertindas (*subaltern*).

## SIMPULAN

Novel *De Winst* karya Afifah Afra, yang *notabene* adalah pengarang perempuan, sebagai sebuah karya fiksi yang berlatar belakang sejarah kolonialisme Belanda di Jawa, mampu memposisikan, menampilkan, dan menciptakan pencitraan-pencitraan yang dialami oleh perempuan Indonesia pada masa kolonialisme, khususnya terkait dengan relasi kekuasaan antara laki-laki kulit putih Eropa dengan kaum perempuan pribumi, seperti apa yang dialami oleh perempuan Indonesia pada saat Indonesia berada dalam kekuasaan kolonialisme Belanda. Bahkan ide-ide feminisme yang tidak memperoleh tempat dalam konteks kolonialisme yang patriarkhal dan menerapkan konsepsi feodalistik kepada bangsa terjajah sangat jelas tercermin dari sikap dan perilaku

tokoh-tokohnya, terutama dari kaum laki-laki kulit putih Belanda yang melanggengkan konsepsi superior-inferior, hegemoni, dan diskriminatif dalam hubungan kekuasaan atas peran dan posisi laki-laki dan perempuan.

Posisi dan peran perempuan pribumi menjadi objek eksploitasi yang menarik tidak hanya dari sisi seksual, tetapi juga dari sisi domestik urusan rumah tangga maupun stereotipe perempuan sebagai makhluk yang lemah, objek kekerasan, marjinal, tidak berpendidikan, terikat pada tradisi, mengabdikan pada keluarga, dan *powerless*. Atribut-atribut tersebut tercermin dari apa yang dialami oleh tokoh perempuan Partini dan Pratiwi dalam Novel *De Winst* yang dilakukan oleh Jan Thijsee, sebagai orang kulit putih Eropa yang memandang dirinya memiliki kekuasaan atas bangsa jajahan. Bagaimana Jan Thijsee dengan menggunakan kekuasaannya kemudian berlaku tidak adil kepada perempuan, terutama kepada Partini dengan menjadikannya sebagai konkubin atau 'istri' yang sebenarnya direpresentasikan sebagai gundik karena secara formal tidak diperistri oleh kaum kulit putih sekaligus juga dijadikannya sebagai subjek *subaltern* tidak saja sebagai buruh kontrak seksual melainkan juga untuk urusan domestik rumah tangga (*double burden*), sementara pada diri Pratiwi, dijadikannya sebagai objek kekerasan seksual serta stereotipe yang melecehkan harga diri dan martabat perempuan. Realitas tersebut menunjukkan bukti hegemoni kekuasaan patriarki laki-laki kulit putih kolonial Belanda atas perempuan pribumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afra, Afifah. 2010. *De Winst*. Cetakan Ketiga. Solo: Afra Publishing
- Anoegrajekti, Novi. 2009. "Resistensi dan Negosiasi Perempuan dalam

- Realitas Fiksi dan Fakta”. *Semiotika*, 10(2), hlm. 151—165
- Ashcroft, Bill et al. 2003. *Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra Postkolonial*. Terjemahan Sirojuddin Arif. Yogyakarta: Qalam
- Bhabha, Homi. 1994. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Barthes, Roland. 1987. “Theory of the Text”. Dalam *Untying the Text: a Poststructuralist Reader*. Robert Young (ed). London and New York: Routledge & Kegan Paul, hlm. 31—47.
- Bashin, K. 1996. *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Baso, A. 2005. “Ke Arah Feminisme Postradisional”, dalam *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*. Jakarta: Desantara
- Dzuhayatin, S dan Susi Eja Yuarsi. 2002. *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Fanon, Franz. 1963. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- Guha, R. 2000. “On Some Aspect of the Historiography of Colonial India”. Dalam Chaturvedi, V. (ed). *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial*. London: Verso
- Jackson, Stevi dan Jones, Jackie (ed). 2009. *Teori-Teori Feminisme Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- La Pona, et al. 2002. “Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan: Kasus di Papua”. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- McClintock, Anne. 1995. *Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Imperial Contest*. London: Routledge
- Meij, Lim Sing. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mishra, Vijay and Bob Hodge. 1994. “What is Postcolonialism?”. Dalam Patrick Williams dan Laura Chrisman (ed). *Colonial Discourse and Postcolonial Theory*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf
- Mohanty, Chandra Talpade. 1984. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”. *Boundary 2*, Vol. 3:333—358
- Ratna, Nyoman Kuntha. 2008. *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Said, Edward W. 2003. *Kekuasaan, Politik, dan Kebudayaan*. Surabaya: Pustaka Promothea
- Saputra, Asep Deni. 2009. “Konstruksi Pernyataan: Perlawanan terhadap Dominasi Kolonial”. *Semiotika*. 10(2), hlm. 117—128
- Scholten, Elsbeth Locher. 1992. “The Nyai In Colonial Deli, A Case Of Supposed Mediation”. Dalam Bemmel, Sita van dkk. (Ed). *Women and Mediation in Indonesia*. Leiden: KITLV Press
- Slemon, Stephen. 2001. “Postcolonial Critical Theories”. Dalam *Postcolonial Discourse: an Anthology*. Grerory Castle (ed). Massachusetts: Blackwell
- Soekirno, Dewi Candraningrum. 2006. “GDI, GEM dan Subaltern Perempuan Indonesia”, diambil pada tanggal 27 Januari 2011, dari [www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C-57%7CX](http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C-57%7CX)
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1993. “Can the Subaltern Speak?”. Dalam Patrick Williams dan Laura Chrisman (ed). *Colonial Discourse and Postcolonial Theory*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf

- Stoler, Ann. 1995. "‘Mixed Blood’ and the Cultural Politics of European Identity in Colonial Southeast Asia". In Jan Nederveen Pietersee and Bhikhu Parekh (eds.) *The Decolonization of Imagination: Culture, Knowledge, and Power*. London & NJ: Zed Books Ltd.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Septiawan. 2007. *Gender dan Inferior Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tong, Rosemarie. 1998. *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press.
- Turner, Bryan S. 2006. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat Bongkar Wacana atas: Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Wahyudi, Ibnu. 2003. *Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia Jilid 7: Pernyataan dalam Kesastraan Melayu Tionghoa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Walia, Shelly. 2003. *Edward Said dan Penulisan Sejarah*. Yogyakarta: Jendela
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1990. *Teori Kesastraan*. Terjemahan Melani Budianta. Jakarta: Gramedia
- [www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C-57%7CX](http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C-57%7CX) (diunduh tanggal 27 Januari 2011)